

Tim Penulis



melihat perspektif

MELIHAT PERSPEKTIF

Tim Penulis:

Ahmad Nurkhin, Agus Wahyudin, Fachrurrozie, Hasan Mukhibad, Ika Agustina, Dyah Prabaningrum, Tri Sulistiyono, Pratama Herry Herlambang, Masyita Isnadya Risky Salsabila, Duhita Driyah Suprapti, Faridhotun Ridho, Yudha Kusuma, Sunarto, Iwan Hardi Saputro, Nugraheni Arumsari, D.Y.P. Sugiharto, Sigit Haryadi, Asep Purwo Yudi Utomo, Ngabiyanto, Isnarto, Hari Bakti Mardikantoro, Muhammad Badrus Siroj, Miranita Khusniati, Andhina Putri Heriyanti, Didi Pramono

Editor:

Asep Purwo Yudi Utomo

Penyunting Bahasa:

Harits Agung Wicaksono

Layout & Desain Cover

Riyadi Widhiyanto

Melihat Perspektif/Akmad Nurkhin dkk.; -Cet. 1-illus-Semarang:
Lppm Unnes, 2020;
xii + 110 hlm; 14,8 x 21 cm
Keanggotaan IKAPI No. 175/ALB/JTE/2019
ISBN : 978-623-66868-3-6

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan YME atas segala rahmat-Nya sehingga book chapter ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Secara umum book chapter ini berisi mengenai berbagai perspektif keilmuan, serta cara pandang penyusun terhadap bidangnya masing-masing. Hasil tulisan yang ada di book chapter ini berasal dari berbagai buku, artikel, serta literasi lainnya yang berkaitan dengan berbagai keilmuan. Namun tentunya telah diolah dan ditulis berdasarkan gaya bahasa penyusun.

Penyusun menyadari bahwa selain kehendak Tuhan YME, juga bantuan dan dorongan dari semua pihak, sehingga penyusunan book chapter ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada Rektor, Dekan-Dekan, dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan book chapter ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam book chapter ini. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaannya, sehingga book chapter ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, November 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

Identitas buku.....	ii
Pakata.....	iii
Daftar isi.....	Iv
Faktor Penentu <i>Islamic Governance Disclosure</i> ; bagaimana peran dewan pengawas syariah?.....	1
Sains, Literasi Sastra, dan Pemuda filantropi.....	12
Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Taiwan dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Bidang Perikanan.....	19
Strategi Peningkatan Investasi dengan Konsep Negara Kesejahteraan Bersama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	26
Pengawasan Pemilu Dengan Perlibatan Partisipasi Masyarakat.....	34
Energi Terbarukan dari Kita untuk Kita.....	56
Belajar Mencintai Alam dan Sains melalui Pemanfaatan Singkong.....	65

Faktor Penentu Islamic Governance Disclosure; Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah?

Ahmad Nurkhin, Agus Wahyudin, Fachrurrozie, Hasan Mukhibad, Ika Agustina
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
ahmadnurkhin@mail.unnes.ac.id

Pendahuluan

Penelitian mengenai *good corporate governance* (GCG) tetap menarik untuk terus dilakukan. GCG telah menjadi instrumen penting dalam manajemen entitas bisnis khususnya. Pengukuran GCG juga beragam dalam penelitian, diantaranya menggunakan proksi mekanisme GCG atau indeks GCG. Beberapa peneliti melakukan kajian terhadap pengungkapan GCG (Green & Graham, 2015; Hassan, 2012; Ntim, Opong, Danbolt, & Thomas, 2012). Selain mengkaji luas pengungkapan, juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya (Gandia, 2008; Ntim et al., 2012). Dalam kerangka perusahaan di Indonesia, Djakman, Siregar, & Harahap (2017) menguji praktik pengungkapan GCG dan menemukan bahwa pengungkapan komite audit dan audit internal masih tergolong rendah pada tahun 2012 dan 2013.

Tsamenyi et al. (2007) menemukan bahwa *ownership structure*, *dispersion of shareholding*, dan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GCG. Gandia (2008) menemukan bahwa tingkat pengungkapan bergantung pada tingkat perusahaan, umur perusahaan, *visibility*, dan kenyataan terkait dengan industri jasa komunikasi dan informasi. Ntim et al. (2012) menemukan bahwa *block ownership* berhubungan negatif dengan pengungkapan GCG, sementara ukuran dewan, ukuran audit firm, *cross-listing*, keberadaan komite CG, *government ownership* dan *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CG secara sukarela.

Luas pengungkapan CG adalah rendah bagi perusahaan dengan dualitas posisi dan tingginya konsentrasi kepemilikan yang diukur dengan *blockholder ownership*. Di samping itu, luas pengungkapan CG akan meningkat seiring dengan proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan (Samaha et al., 2012). Hasil penelitian lainnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara pengungkapan CG dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran, *leverage*, dan *foreign*

ownership. Sementara *listing age* dan *profitabilitas* tidak terbukti berhubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan CG. Ukuran perusahaan merupakan *predictor* paling signifikan yang mampu mempengaruhi pengungkapan CG (Sharma, 2014).

Seperti yang telah diketahui, bank yang beroperasi di Indonesia terdiri atas dua bentuk, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Bank syariah juga mengimplementasikan GCG dalam operasionalnya. Dikenal beberapa istilah seperti *shari'ah corporate governance* atau *shari'ah governance* (Ginena, 2014; Z. Hasan, 2010; Muneeza & Hassan, 2014), atau *Islamic corporate governance* (Bhatti & Bhatti, 2010; Choudhury & Alam, 2013; Elghuweel et al., 2017).

Shari'ah corporate governance berbeda dengan GCG konvensional karena tujuan keduanya sangat unik (Alnasser & Muhammed, 2012). Dalam kerangka *shari'ah corporate governance*, pengambilan keputusan bagi perusahaan harus berlandaskan syura atau konsultasi (Muneeza & Hassan, 2014). Hassan (2009) mengajukan dua struktur pada *shari'ah corporate governance*, yaitu pendekatan tauhid dan syura serta pendekatan *stakeholders*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menjadi pedoman pelaksanaan pengungkapan GCG bagi bank syariah (Ardhanawati, 2017).

Darmadi (2013) berusaha mengungkap praktik GCG pada bank syariah di Indonesia. Dia menggunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI) untuk menilai tingkat pengungkapan pada tujuh bank umum syariah di Indonesia. Sementara itu Abdullah, Percy, & Stewart (2013) membandingkan pengungkapan syariah dalam kerangka sistem *shari'ah governance* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia dengan periode pengamatan tahun 2009. Ardhanawati (2017) melakukan penelitian pada dua bank umum syariah, yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah.

Konsep Islamic Governance Disclosure

Teori keagenan menjadi teori dasar dalam diskusi IGD ini. Teori keagenan sangat sering dijadikan dasar dalam mengkaji GCG. *Agency theory* menjelaskan hubungan agensi (principal) dan agen (agent) untuk tujuan tertentu dengan adanya pendelegasian wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Lebih lanjut ia menyatakan akan terjadi konflik keagenan, yaitu perbedaan kepentingan antara principal dengan agen. Penyebab konflik tersebut diantaranya karena pengambilan keputusan

yang berbeda untuk pencarian dana dan untuk apa dana tersebut diinvestasikan. Konflik agensi dapat diminimalisir dengan adanya mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, akan timbul biaya keagenan.

Shleifer & Vishny (1996) mengartikan *corporate governance* sebagai sebuah model/set peraturan pengembangan praktis kelembagaan untuk melindungi investor dari perilaku oportunistik manajerial dan jiwa intreprenur. Hasan & Butt (2009) menyatakan *corporate governance* dapat dimaknai sebagai filosofi dan mekanisme yang berkaitan dengan penciptaan nilai bagi pemegang saham.

Peningkatan jumlah perusahaan yang harus mematuhi syariah membutuhkan formulasi aturan mengenai *corporate governance* yang *in line* dengan hukum Islam (Muneeza & Hassan, 2014). Tujuannya tidak hanya bekerja untuk meraih keuntungan bagi pemegang saham dan stakeholders, tetapi juga berterimakasih kepada Tuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ginena (2014) menyatakan bahwa tata kelola syariah adalah sistem keseluruhan yang mengatur kesesuaian bank syariah dan institusi keuangan syariah dengan syariah yang berkaitan dengan transaksi komersial dalam semua kegiatan.

Pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah di Indonesia termasuk pengungkapannya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang mulai berlaku per 1 Januari 2010. Hasan (2010) berpendapat bahwa model *shariah governance* dalam lembaga keuangan Islam masih belum *existing*. Ginena (2014) menyatakan paling tidak terdapat lima (5) model penerapan sistem *shariah governance*, yaitu *reactive approach* (diterapkan di UK dan Turki), *passive approach* (diterapkan di Arab Saudi), *minimalist approach* (diterapkan di Bahrain, Dubai, dan Qatar), *pro-active approach* (diterapkan di Malaysia), dan *interventionist approach* (diterapkan di Pakistan). Beberapa lembaga internasional mengeluarkan standart dan prinsip mengenai GCG, seperti OECD, IFSB, dan AAOIFI.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Islamic Governance Disclosure* (IGD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengungkapan atas pelaksanaan GCG pada bank umum syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimensi yang membedakan antara pengungkapan GCG dan IGD diantaranya adalah pengungkapan mengenai keberadaan dewan pengawas syariah (DPS), kinerja zakat, pendapatan non halal, dan dimensi pengungkapan lainnya.

Faktor Penentu Islamic Governance Disclosure

Uraian ini menunjukkan hasil penelitian yang menguji faktor penentu *Islamic governance disclosure (IGD)* pada bank syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian adalah bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang dimaksud yaitu tersedianya laporan tahunan secara online selama 8 tahun pengamatan (tahun 2011 sampai dengan tahun 2018). Terdapat 9 bank Syariah yang memenuhi kriteria.

Dokumentasi dan *content analysis* digunakan untuk pengumpulan data. Content analysis dikembangkan dari peneliti sebelumnya (Abdullah et al., 2013) untuk mengukur pengungkapan *Islamic governance*. Analisis jalur digunakan sebagai metode analisis data untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap IGD. Software yang digunakan adalah WarpPLS 6.0.

Hasil uji prasyarat dengan menggunakan software WarpPLS tampak pada tabel 1 berikut ini. Berdasarkan hasil uji kriteria prasyarat, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan karena telah memenuhi semua kriteria.

Tabel 1. Hasil Uji Prasyarat

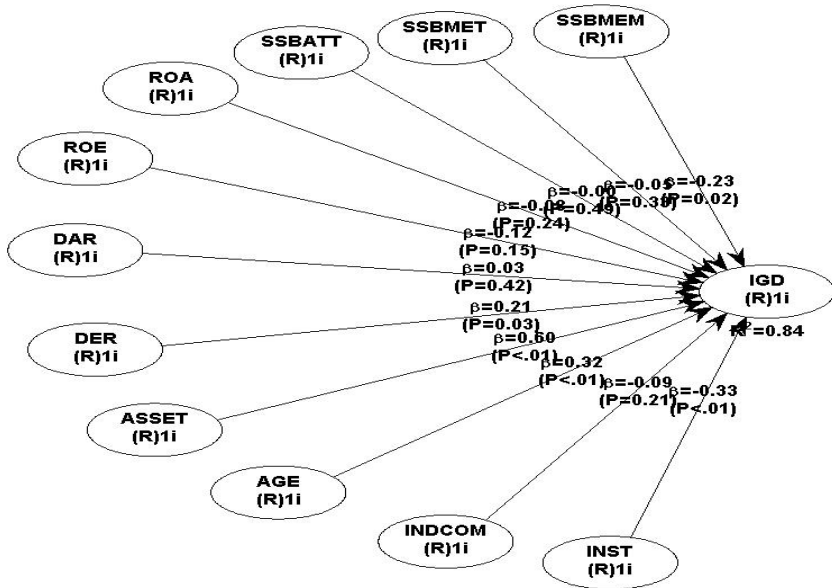
Item Pengujian	Kriteria	Hasil Pengujian
Average path coefficient (APC)	$P < 0.005$	APC=0.187, P=0.024 Memenuhi persyaratan
Average R-squared (ARS)	$P < 0.005$	ARS=0.840, P<0.001 Memenuhi persyaratan
Average adjusted R-squared (AARS)	$P < 0.005$	AARS=0.810, P<0.001 Memenuhi persyaratan
Average block VIF (AVIF)	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	AVIF=2.751 Ideal
Average full collinearity VIF (AFVIF)	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	AFVIF=3.111 Ideal

Hasil pengujian hipotesis tampak pada gambar 1. Hasil pengujian menunjukkan SSBMEM (keanggotaan dewan pengawas Syariah) memiliki nilai $P = 0,02$ dengan koefisien $-0,23$ yang berarti dewan pengawas Syariah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Islamic governance disclosure (IGD). Namun demikian, nilai

koefisiennya adalah negatif. Variabel SSBMET (jumlah rapat dewan pengawas Syariah) memiliki nilai $P = 0,330$ dengan nilai koefisien = $-0,051$. Hal ini berarti rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap IGD. SSBATT (kehadiran DPS) memiliki nilai $P = 0,487$ dengan nilai koefisien $-0,004$ yang berarti tingkat kehadiran anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap IGD.

Variabel profitabilitas diukur dengan dua proksi, yaitu ROA dan ROE. Keduanya tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Hal ini bisa dilihat nilai P masing-masing yang lebih dari $0,005$ yaitu $0,239$ dan $0,153$. Sementara variabel leverage dengan proksi DER terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Nilai P dari DER adalah $0,031$ atau kurang dari $0,05$ dengan nilai koefisien jalur $0,025$. Variabel ukuran perusahaan terbukti sebagai penentu IGD. Nilai $P < 0,001$ dengan koefisien jalur $0,602$.

Variabel umur perusahaan (AGE) memiliki nilai $P = 0,002$ dengan koefisien jalur $0,318$. Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan terbukti sebagai penentu IGD. Variabel INDCOM (komisaris independen) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Nilai P dari INDCOM sebesar $0,208$ atau lebih besar dari $0,05$. Dan variabel INST (kepemilikan institusional) mempunyai nilai $P 0,001$ dengan koefisien $-0,330$. Hal ini berarti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap IGD.



Gambar 1. Path Analysis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dengan proksi DER, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, terbukti mampu mempengaruhi IGD secara positif dan signifikan. Sedangkan keberadaan dewan pengawas Syariah dengan proksi jumlah anggota DPS dan kepemilikan institusional terbukti mampu mempengaruhi IGD secara negatif dan signifikan. Sementara variabel lainnya tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD.

Keberadaan DPS seharusnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap IGD. Artinya keberadaan DPS akan menyebabkan manajemen bank Syariah untuk melakukan pengungkapan informasi secara penuh, termasuk mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, keberadaan DPS yang diukur dengan jumlah anggota terbukti signifikan namun negatif. Meningkatnya jumlah anggota DPS malah menyebabkan turunnya indeks pengungkapan Islamic governance. Hal ini bisa dimaknai bahwa jumlah anggota DPS tidak perlu banyak namun lebih dipentingkan kinerjanya. Indrawaty & Wardayati (2016) menyatakan bahwa komposisi keanggotaan DPS merupakan faktor penentu *Islamic corporate governance*. Sarhan & Ntim (2018) menemukan bahwa indeks *Islamic value* berpengaruh

positif dan signifikan terhadap CGDI. Nurkhin et al. (2018) membuktikan bahwa jumlah anggota DPS dapat mempengaruhi kinerja bank syariah secara signifikan.

Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Bank Syariah telah menganggap bahwa pengungkapan *Islamic governance* adalah penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak tergantung pada kondisi perusahaan apakah sedang meraih keuntungan ataukah tidak. Hasil penelitian mendukung hasil studi sebelumnya (Azid & Alnodel, 2018; Samaha et al., 2012). Namun demikian, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa profitabilitas adalah penentu IGD secara positif dan signifikan (Grassa, 2018; Sarhan & Ntim, 2018).

Leverage juga terbukti menjadi penentu IGD secara positif dan signifikan. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* bank Syariah maka semakin tinggi pula indeks pengungkapan *Islamic governance*. Manajemen bank Syariah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola perusahaan dengan baik walaupun mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Dengan demikian, kepercayaan terhadap bank tetap terjaga. Grassa (2018) dan Sharma (2014) telah berhasil menemukan pengaruh signifikan leverage terhadap *governance disclosure*. Sementara Azid & Alnodel (2018) and Sarhan & Ntim (2018) menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Hasil penelitian berikutnya juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan adalah penentu IGD secara signifikan. Tingkat pengungkapan *Islamic governance* akan semakin tinggi jika bank Syariah mempunyai asset yang tinggi. Semakin besar Bank Syariah maka akan semakin lebih memahami pentingnya pengungkapan *Islamic governance*. Hasil penelitian mendukung temuan sebelumnya (Abdullah et al., 2015; Haddad et al., 2017; Sarhan & Ntim, 2018). Sharma (2014) juga menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan *corporate governance disclosure*.

Pengungkapan *Islamic governance* juga dipengaruhi oleh umur perusahaan. Sama dengan tingkat ukuran perusahaan, semakin lama berdiri bank Syariah, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan *Islamic governance*-nya. Bank Syariah yang telah lama berdiri telah melalui banyak sekali peraturan dan pedoman pelaksanaan *Islamic governance*. Pengungkapan *Islamic governance* dianggap mempunyai dampak positif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IGD. Artinya bahwa kepemilikan saham oleh institusi

menghendaki rendahnya tingkat pengungkapan *Islamic governance*. Hal ini bisa dikarenakan tingkat pemahaman yang kurang baik terhadap pentingnya pengungkapan *Islamic governance* atau pengungkapan *Islamic governance* dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank Syariah, sehingga tidak perlu dilaksanakan dengan baik. Semakin tinggi pengungkapan *Islamic governance* maka memungkinkan semakin banyak informasi yang tersebar secara terbuka. Hal ini mungkin tidak diinginkan oleh pemilik saham institusi.

Penutup

Keberadaan dewan pengawas Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam operasional bank Syariah. DPS dapat menjalankan peran untuk menjamin operasional bank Syariah telah sesuai dengan Syariah (hukum Islam). Paper ini membuktikan bahwa keberadaan DPS yang diukur dengan jumlah anggota DPS dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic governance* secara signifikan. Di samping itu, IGD juga dipengaruhi oleh *leverage*, *size*, *age*, dan *institutional ownership*. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif.

Keberadaan DPS dengan ukuran jumlah rapat yang dilaksanakan dan tingkat kehadiran rapat tidak mampu mempengaruhi IGD secara signifikan. Sementara itu, profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Komposisi dewan komisaris independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IGD.

Daftar Pustaka

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari'ah disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks; the Shari'ah governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100–131. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0063>
- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants of voluntary corporate governance disclosure: Evidence from Islamic banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council regions. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(3), 262–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220–

231. <https://doi.org/10.1108/08288661211258110>
- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan pengungkapan good corporate governance pada bank umum syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 66–78.
- Azid, T., & Alnodel, A. A. (2018). Determinants of Shari'ah governance disclosure in financial institutions Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2018-0111>
- Bhatti, M., & Bhatti, M. I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics and Policy*, 2(1), 25–38. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x>
- Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 6(2), 116–128. <https://doi.org/10.1108/14720700610655132>
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. *Humanomics*, 29(1), 4–23. <https://doi.org/10.1108/08288661311299295>
- Djakman, C. D., Siregar, S. V., & Harahap, S. N. (2017). Corporate Governance Disclosure in Indonesia. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*, 25(4), 1739–1752.
- Elghuweel, M. I., Ntim, C. G., Opong, K. K., & Avison, L. (2017). Corporate governance, Islamic governance and earnings management in Oman: A new empirical insights from a behavioural theoretical framework. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 190–224. <https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2015-0064>
- Gandia, J. L. (2008). Determinants of internet-based corporate governance disclosure by Spanish listed companies. *Online Information Review*, 32(6), 791–817. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/14684520810923944>
- Ginena, K. (2014). Shari'ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2013-0038>

- Grassa, R. (2018). Deposits structure, ownership concentration and corporate governance disclosure in GCC Islamic banks: Empirical evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 587–606. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0034>
- Green, D., & Graham, C. (2015). Accountability and Independence in Corporate Governance: An Analysis of Board Disclosures in Canada. In *Corporate Governance: Does any Size Fit?* (pp. 1–11). [https://doi.org/10.1016/S1041-7060\(05\)11001-3](https://doi.org/10.1016/S1041-7060(05)11001-3)
- Haddad, A. E., Sbeiti, W. M., & Qasim, A. (2017). review Accounting legislation, corporate governance codes and disclosure in Jordan: a review. *International Journal of Law and Management*, 59(1), 147–176. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2016-0064>
- Hasan, A., & Butt, S. A. (2009). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies. *International Journal of Business and Management*, 4(2), 50–57. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n2p50>
- Hasan, Z. (2010). Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia , GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 82–115. <https://doi.org/10.1108/17538391111122195>
- Hassan, M. K. (2012). A disclosure index to measure the extent of corporate governance reporting by UAE listed corporations. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 10(1), 4–33. <https://doi.org/10.1108/19852511211237426>
- Indrawaty, & Wardayati, S. M. (2016). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 338–343. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). Shari'ah corporate governance: the need for a special governance code. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 14(1), 120–129. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2011-0015>
- Ntim, C. G., Opong, K. K., Danbolt, J., & Thomas, D. A. (2012). Voluntary corporate governance disclosures by post-Apartheid

- South African corporations. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 122–144. <https://doi.org/10.1108/09675421211254830>
- Nurkhin, A., Rohman, A., Rofiq, A., & Mukhibad, H. (2018). The role of the Sharia Supervisory Board and corporate governance mechanisms in enhancing Islamic performance – evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 85–95. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(4\).2018.08](https://doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.08)
- Parsa, S., Chong, G., & Isimoya, E. (2007). Disclosure of governance information by small and medium-sized companies. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 7(5), 635–648. <https://doi.org/10.1108/14720700710827211>
- Qu, W., & Leung, P. (2006). Cultural impact on Chinese corporate disclosure – a corporate governance perspective. *Managerial Auditing Journal*, 21(3), 241–264. <https://doi.org/10.1108/02686900610652991>
- Samaha, K., Dahawy, K., Hussainey, K., & Stapleton, P. (2012). The extent of corporate governance disclosure its determinants developing market: The case of Egypt. *Advances in Accounting*, 28(1), 168–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001>
- Sarhan, A. A., & Ntim, C. G. (2018). Firm- and country-level governance compliance and disclosure in MENA countries. *Managerial Auditing Journal*, 33(6/7), 558–585. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2017-1688>
- Sharma, N. (2014). Extent of corporate governance disclosure by banks and finance companies listed on Nepal Stock Exchange. *Advances in Accounting*, 30(2), 425–439. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adiac.2014.09.014> Get
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1996). *A survey of corporate governance*.
- Tsamenyi, M., Enninful-Adu, E., & Onumah, J. (2007). Disclosure and corporate governance in developing countries: evidence from Ghana. *Managerial Auditing Journal*, 22(3), 319–334. <https://doi.org/10.1108/02686900710733170>



melihat perspektif

ISBN 978-623-6686-83-6 (softcover)

